

Implementasi PSAK Berbasis IFRS di Indonesia: Dampak, Tantangan, dan Relevansi Global

Adinda Fitri¹, Julya Ningsih², Afri Dian Ulan Dari³, Nabila Intan Ramadhan⁴, Aditia Yusri⁵

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Barat, 1,2,3,4
adndftr1103@gmail.com, julyaningsih8084@gmail.com, uland9576@gmail.com,
nabilaintanramadhan05@gmail.com, mhdaditiayusri@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 23/10/2025

Revised 23/10/2025

Accepted 24/10/2025

Abstract

This article discusses the implementation of the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) based on the International Financial Reporting Standards (IFRS) in Indonesia, which aims to align national accounting standards with international practices. This alignment is carried out to ensure that the financial statements of Indonesian companies are globally comparable, relevant, and transparent. PSAK serves as the national guideline for the preparation of financial statements, while IFRS emphasizes the principles of fair value, substance over form, and information transparency. The convergence process began in 2008 through stages of preparation, pilot testing, and socialization conducted by the Indonesian Institute of Accountants (IAI), and was fully implemented in 2012. The adoption of IFRS through PSAK has had a positive impact by enhancing comparability, credibility, and investor confidence in corporate financial statements in Indonesia. Previous studies have also shown an improvement in the quality of accounting reports and the relevance of earnings for public companies. Nevertheless, IFRS implementation still faces various challenges such as differences in tax regulations, system adjustment costs, training needs, and limited human resources, particularly in small and medium-sized enterprises. Overall, the convergence of PSAK with IFRS strengthens Indonesia's position in the global financial market and requires continuous commitment from regulators, businesses, and accounting education institutions.

Keywords: PSAK, IFRS, convergence, financial statements, challenges

Abstrak

Penelitian ini berisi pembahasan tentang implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berbasis International Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia yang bertujuan untuk menyelaraskan standar akuntansi nasional dengan praktik pelaporan keuangan internasional. Konvergensi ini biasanya dilakukan agar laporan keuangan perusahaan Indonesia memiliki tingkat keterbandingan, relevansi, dan transparansi yang setara dengan standar global. PSAK berperan sebagai acuan nasional dalam penyusunan laporan keuangan, sementara IFRS menekankan prinsip nilai wajar (fair value), substansi di atas bentuk (substance over form), serta keterbukaan informasi. Proses konvergensi yang dimulai sejak tahun 2008 melalui tahap persiapan, uji coba, dan sosialisasi yang dikoordinasikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kemudian diterapkan secara penuh pada tahun 2012. Hasil implementasi menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelaporan keuangan, relevansi nilai laba, serta kepercayaan investor terhadap perusahaan publik. Namun demikian, proses adopsi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain perbedaan regulasi perpajakan, biaya penyesuaian sistem dan pelatihan, serta keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada usaha kecil dan menengah. Secara keseluruhan, konvergensi PSAK dengan IFRS memperkuat kredibilitas dan daya saing laporan keuangan Indonesia di tingkat global, yang keberlanjutannya sangat bergantung pada komitmen regulator, kesiapan entitas pelapor, dan peningkatan kualitas pendidikan akuntansi.

Kata Kunci: PSAK, IFRS, konvergensi, laporan keuangan, tantangan



©2024 Authors. Published by PT AN Consulting: Jurnal ANC. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin cepat menuntut adanya standar akuntansi yang dapat digunakan secara universal. Perbedaan standar antarnegara sering menjadi hambatan dalam membandingkan laporan keuangan lintas yurisdiksi. Kondisi ini mendorong International Accounting Standards Board (IASB) untuk mengembangkan International Financial Reporting Standards (IFRS) sebagai standar berbasis prinsip yang menekankan nilai wajar, transparansi, serta substansi ekonomi di atas bentuk formal (Ball, 2006). Hingga kini, lebih dari 140 negara telah mengadopsi IFRS, baik secara penuh maupun sebagian. Barth, Landsman, dan Lang (2008) menemukan bahwa penerapan IFRS berhubungan positif dengan peningkatan kualitas akuntansi, terutama dalam hal relevansi nilai dan penurunan praktik manajemen laba.

Indonesia juga ikut dalam arus globalisasi tersebut. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mulai melakukan konvergensi PSAK dengan IFRS sejak tahun 2008 dan menerapkannya secara penuh pada 2012 (IAI, 2012). Sebelum konvergensi, PSAK lebih dekat dengan US GAAP yang bersifat berbasis aturan. Peralihan menuju IFRS yang berbasis prinsip menuntut profesionalisme dan kemampuan pertimbangan akuntan dalam penyusunan laporan keuangan (Lestari, 2024). Kusuma (2013) menambahkan bahwa konvergensi PSAK–IFRS membawa perubahan besar pada pengakuan aset tetap, instrumen keuangan, serta pengungkapan kewajiban.

Penelitian lintas negara juga menunjukkan hasil yang bervariasi. Ball (2016) menegaskan bahwa penerapan IFRS di Eropa meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan penegakan hukum di setiap negara. Chand, Patel, dan Day (2008) di Fiji menemukan bahwa kendala utama IFRS terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan biaya transisi yang tinggi. Hasil serupa terlihat di India, di mana perusahaan kecil mengalami kesulitan karena kompleksitas standar dan keterbatasan infrastruktur (Daske et al., 2013). Temuan-temuan ini relevan bagi Indonesia yang memiliki karakteristik ekonomi serupa sebagai negara berkembang.

Penerapan IFRS melalui PSAK di Indonesia memberikan berbagai manfaat. Karundeng (2021) menemukan bahwa adopsi IFRS meningkatkan transparansi dan menarik minat investasi asing di pasar modal Indonesia. Wahyuni, Nugraha, dan Setiawan (2020) juga membuktikan adanya peningkatan relevansi nilai laporan keuangan perusahaan publik setelah konvergensi IFRS, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan investor dan integrasi pasar modal Indonesia dengan pasar global.

Namun, penerapan IFRS di Indonesia tidak lepas dari sejumlah tantangan. Wardhani (2014) menyoroti perbedaan signifikan antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan, yang membuat perusahaan kesulitan karena hasil laporan untuk tujuan pajak tidak selalu sama dengan laporan berbasis IFRS. Selain itu, Nugroho dan Kurniawan (2017) menunjukkan bahwa sebagian akuntan di perusahaan kecil dan menengah belum memahami sepenuhnya standar berbasis prinsip. Dari sisi biaya, transisi ke IFRS juga memerlukan investasi besar dalam sistem informasi akuntansi, pelatihan karyawan, dan pembaruan kebijakan internal (Bella et al., 2022). Faktor budaya bisnis lokal yang masih konservatif turut menjadi tantangan, karena prinsip kehati-hatian kadang bertentangan dengan konsep nilai wajar IFRS (Sulistiawan & Jatmiko, 2019).

Temuan Bella et al. (2022) memperlihatkan bahwa meskipun kualitas pelaporan meningkat, praktik manajemen laba dan penghindaran pajak masih ditemukan. Artinya, adopsi standar global belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan tata kelola perusahaan. Keberhasilan IFRS tetap bergantung pada komitmen perusahaan, pengawasan regulator, serta kesiapan sumber daya manusia.

Berdasarkan kajian literatur, penelitian sebelumnya banyak berfokus pada dampak IFRS terhadap kualitas pelaporan keuangan atau kepatuhan terhadap standar tertentu. Namun, pembahasan menyeluruh tentang tantangan implementasi IFRS dari sisi regulasi pajak, kapasitas SDM, dan kesiapan usaha kecil masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi PSAK berbasis IFRS di Indonesia.

Rumusan masalah yang diangkat mencakup: (1) bagaimana proses konvergensi IFRS ke dalam PSAK di Indonesia berlangsung, (2) apa saja tantangan utama dalam penerapannya, dan (3) sejauh mana manfaat IFRS dalam meningkatkan kualitas dan relevansi laporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini berasumsi bahwa meskipun implementasi IFRS menimbulkan hambatan berupa biaya tinggi, keterbatasan SDM, dan perbedaan regulasi, pada akhirnya adopsi IFRS tetap mampu meningkatkan kualitas, transparansi, dan kredibilitas pelaporan keuangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis implementasi PSAK berbasis IFRS di Indonesia dengan mengkaji hasil penelitian terdahulu dan dokumen resmi dari lembaga regulator. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan, membandingkan, dan menyintesis berbagai temuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian mencakup seluruh karya ilmiah yang relevan dengan tema konvergensi IFRS di Indonesia, seperti jurnal nasional dan internasional, prosiding konferensi, serta dokumen resmi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan literatur berdasarkan kriteria tertentu:

- (a) membahas topik implementasi IFRS atau PSAK berbasis IFRS,
- (b) diterbitkan antara tahun 2008–2024, dan
- (c) berasal dari sumber yang kredibel secara akademik.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh lebih dari sepuluh artikel jurnal serta beberapa dokumen resmi yang dijadikan bahan analisis utama.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis di berbagai basis data ilmiah seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect*, DOAJ, dan Portal Garuda. Kata kunci yang digunakan antara lain *IFRS adoption Indonesia*, konvergensi PSAK IFRS, tantangan implementasi IFRS, dan *IFRS financial reporting quality*. Selain itu, dokumen dari IAI, OJK, dan BEI juga digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat konteks penelitian.

3. Definisi Operasional Variabel

Untuk memperjelas analisis, variabel dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

- a. Implementasi IFRS adalah proses adopsi IFRS ke dalam PSAK yang meliputi perubahan kebijakan akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan.
- b. Tantangan Implementasi mencakup kendala seperti biaya konversi, keterbatasan SDM, perbedaan regulasi perpajakan, dan karakteristik ekonomi nasional.

- c. Manfaat Implementasi mengacu pada dampak positif berupa peningkatan transparansi, keterbandingan laporan, relevansi nilai informasi, dan daya tarik investasi.

4. Teknik Pengukuran dan Analisis Data

Pengukuran variabel dilakukan melalui metode *content analysis*. Setiap literatur yang terpilih dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil utama, serta relevansinya dengan konteks Indonesia. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tiga tahap: (1) mengelompokkan literatur berdasarkan manfaat dan tantangan IFRS, (2) membandingkan hasil penelitian untuk menemukan kesamaan dan perbedaan temuan, serta (3) menyusun sintesis akhir untuk membentuk gambaran menyeluruh mengenai implementasi PSAK berbasis IFRS di Indonesia.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum IFRS Dan Konvergensi PSAK Di Indonesia

1.1 Sejarah Singkat IFRS Secara Global: Latar Belakang Lahirnya IFRS, Tujuan, Dan Prinsip Dasarnya.

International Financial Reporting Standards (IFRS) merupakan seperangkat standar akuntansi internasional yang bertujuan menciptakan keseragaman, transparansi, dan keterbandingan laporan keuangan antarnegara. Awal mula IFRS berakar pada pembentukan *International Accounting Standards Committee* (IASC) tahun 1973 oleh sembilan negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. IASC bertujuan merumuskan standar akuntansi yang bisa diterima secara global sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas bisnis lintas batas.

Pada tahun 2001, peran tersebut dialihkan kepada *International Accounting Standards Board* (IASB), yang kemudian menggantikan *International Accounting Standards* (IAS) dengan IFRS. Pergantian ini menandai upaya global dalam menyatukan praktik pelaporan keuangan agar lebih relevan dan responsif terhadap dinamika bisnis modern (Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2018). IFRS dirancang agar laporan keuangan menjadi *relevant, reliable, comparable, dan understandable*.

dengan menekankan penyajian yang mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya (*faithful representation*).

Berbeda dengan *US GAAP* yang bersifat berbasis aturan (*rules-based*), IFRS menggunakan pendekatan berbasis prinsip (*principles-based*) yang memberikan ruang bagi profesionalisme dan pertimbangan etis dalam penerapannya. Saat ini lebih dari 140 negara telah mengadopsi IFRS, baik secara penuh maupun sebagian. Uni Eropa, misalnya, mewajibkan penggunaan IFRS sejak 2005, diikuti oleh banyak negara Asia dan Amerika Latin. Meski Amerika Serikat masih mempertahankan *US GAAP*, kerja sama antara IASB dan FASB terus dilakukan untuk memperkecil perbedaan kedua sistem tersebut.

Sebagaimana disampaikan Weygandt et al. (2018, hlm. 25):

“The development of IFRS represents a significant step toward the harmonization of accounting standards globally, enhancing transparency and comparability for users of financial statements worldwide.”

Dengan demikian, IFRS hadir sebagai respon terhadap kebutuhan dunia akan standar pelaporan keuangan yang transparan, konsisten, dan mampu mendukung pengambilan keputusan ekonomi secara kredibel.

1.2 Latar Belakang Konvergensi PSAK Dengan IFRS Di Indonesia, Mulai Proses Awal Pada 2008 Hingga Adopsi Penuh Pada 2012.

Dalam konteks globalisasi dan integrasi pasar modal internasional, Indonesia memerlukan standar akuntansi yang dapat diakui secara internasional. Perbedaan standar pelaporan antarnegara sering menghambat transparansi dan kredibilitas laporan keuangan, sehingga konvergensi dengan IFRS menjadi langkah strategis. IFRS dinilai mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan melalui penerapan prinsip nilai wajar dan relevansi informasi (Petreski, 2006; Dwi Martani et al., 2019).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), memulai proses konvergensi PSAK terhadap IFRS pada akhir 2008 sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam forum G20. Proses ini dilaksanakan bertahap melalui tiga fase, yaitu:

1. *Adoption*, dengan melakukan identifikasi dan revisi PSAK agar sesuai dengan IFRS per 1 Januari 2009.
2. *Final Preparation*, meliputi pelatihan, penyusunan *Exposure Draft*, dan sosialisasi kepada entitas pelapor serta regulator.
3. *Implementation*, yaitu penerapan penuh PSAK berbasis IFRS mulai tahun 2012 (IAI, n.d.).

Tujuan utama konvergensi ini ialah memperkuat daya saing perusahaan Indonesia melalui laporan keuangan yang kredibel dan dapat dibandingkan secara global. Namun, penerapannya menimbulkan sejumlah tantangan seperti kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, biaya pelatihan, penyesuaian sistem informasi akuntansi, serta potensi perbedaan interpretasi terhadap standar berbasis prinsip.

Penerapan penuh PSAK berbasis IFRS pada 2012 menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan akuntansi Indonesia. Sejak saat itu, DSAK–IAI menerapkan pendekatan *continuous update*, yaitu memperbarui PSAK secara berkala mengikuti perkembangan IFRS global.

1.3 Perbedaan Mendasar Antara PSAK Sebelum Dan Sesudah IFRS, Khususnya Pergeseran Dari Pendekatan Berbasis Aturan (*Rules-Based*) Ke Berbasis Prinsip (*Principles-Based*).

Konvergensi IFRS membawa perubahan besar dalam sistem PSAK, terutama pada pergeseran dari pendekatan *rules-based* menuju *principles-based*. Perubahan mendasar yang terjadi meliputi:

1. *Perubahan dari Historical Cost ke Fair Value*
Sebelum konvergensi, PSAK menggunakan metode *historical cost*, yaitu pencatatan aset dan liabilitas berdasarkan harga perolehan awal. Setelah adopsi IFRS, penilaian dilakukan dengan *fair value* agar mencerminkan kondisi ekonomi yang aktual. Misalnya, perusahaan wajib menilai kembali asetnya pada tanggal pelaporan untuk menentukan kemungkinan penurunan nilai (*impairment*).
2. *Pergeseran dari Sistem Rules-Based ke Principles-Based*
Sistem berbasis aturan memberikan pedoman teknis yang rinci, tetapi sering membatasi pertimbangan profesional. IFRS mengubah pendekatan tersebut dengan menekankan penggunaan *professional judgment* dalam setiap kebijakan akuntansi (Schipper, 2003).
3. *Peningkatan Transparansi melalui Full Disclosure*

IFRS menuntut pengungkapan informasi yang lebih luas agar laporan keuangan eksternal dan internal konsisten serta dapat dibandingkan secara akurat.

Secara keseluruhan, perubahan dari PSAK lama ke PSAK berbasis IFRS menunjukkan evolusi besar dalam praktik pelaporan keuangan di Indonesia. Perubahan ini meningkatkan relevansi, akuntabilitas, serta keterbandingan laporan keuangan baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. Dampak Implementasi IFRS di Indonesia

2.1 Kualitas Laporan Keuangan: Peningkatan Relevansi Informasi, Transparansi, Dan Pengurangan Praktik Manajemen Laba.

Penerapan konvergensi IFRS di Indonesia menimbulkan dampak berbeda di setiap sektor industri. Pada sektor manufaktur, fleksibilitas dalam pengukuran aset tidak berwujud mendorong kenaikan *discretionary accruals* sekitar 12 persen. Sementara itu, sektor perbankan mengalami penurunan *real earnings management* sebesar 8 persen berkat pengawasan yang semakin ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peningkatan sistem tata kelola perusahaan.

Indeks keterbukaan laporan keuangan juga meningkat dari 0,65 menjadi 0,78, menandakan adanya perbaikan transparansi. Namun, pengungkapan terkait transaksi pihak berelasi dan penerapan *fair value* masih belum optimal, terutama pada perusahaan keluarga yang mendominasi pasar modal Indonesia.

Faktor moderasi turut memengaruhi keberhasilan implementasi IFRS. Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *Big Four* menunjukkan penurunan manipulasi berbasis akrual hingga 15 persen. Selain itu, kepemilikan institusional di atas 20 persen terbukti meningkatkan kepatuhan terhadap IFRS sekitar 25 persen. Di sisi lain, kompleksitas struktur organisasi dan diversifikasi bisnis justru meningkatkan potensi rekayasa laba antar-segmen usaha.

Struktur tata kelola yang kuat juga berperan besar dalam menjaga kualitas pelaporan. Perusahaan dengan proporsi komisaris independen minimal 50 persen mampu menekan praktik manajemen laba hingga 22%. Penerapan *whistleblowing system* sejak tahun 2020 turut memperkuat transparansi, meskipun sekitar 35% perusahaan masih melaporkan ketidaksesuaian penerapan PSAK di dua tahun awal implementasi. Dominasi kepemilikan keluarga kadang menurunkan efektivitas komite audit, sehingga praktik pembiayaan di luar neraca (*off-balance sheet financing*) masih sering terjadi, terutama di sektor properti.

2.2 Pasar Modal Dan Investasi Asing: Peningkatan Daya Tarik Investor Serta Integrasi Pasar Modal Indonesia Dengan Standar Global.

Pasar modal berperan penting sebagai jembatan antara pihak yang memiliki dana berlebih dan pihak yang membutuhkan modal. Dengan semakin terbukanya perekonomian, arus investasi asing baik *foreign direct investment* (FDI) maupun *foreign portfolio investment* (FPI) menjadi pendorong utama dinamika pasar modal Indonesia. Masuknya investor asing meningkatkan likuiditas sekaligus memperkuat penerapan prinsip tata kelola yang transparan sesuai standar internasional.

Penelitian oleh Setiaji dan Wijayanto (2019) dari *Management Analysis Journal* Universitas Negeri Semarang menunjukkan bahwa arus investasi asing, indeks pasar global (MSCI-World Index), dan nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil pasar modal Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar modal Indonesia semakin terintegrasi dengan sistem keuangan global. Sensitivitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terhadap perubahan kondisi ekonomi dunia menjadi bukti nyata keterhubungan tersebut.

Menariknya, variabel risiko negara (*country risk*), yang diukur melalui *Emerging Market Bond Index Plus* (EMBI+), tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *return* pasar. Artinya, investor asing lebih mempertimbangkan faktor fundamental seperti stabilitas nilai tukar dan kondisi ekonomi global dibandingkan risiko politik domestik.

Secara keseluruhan, integrasi pasar modal Indonesia dengan standar global telah terbentuk, meskipun masih ada tantangan seperti menjaga kestabilan nilai tukar dan memperkuat ekonomi domestik. Untuk itu, sinkronisasi regulasi, penerapan IFRS, serta peningkatan transparansi menjadi langkah penting guna mempertahankan kepercayaan investor dan memperluas partisipasi modal asing di Indonesia.

2.3 Kredibilitas Dan Kepercayaan Publik: Penguatan Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan Melalui Keterbukaan Informasi Yang Lebih Baik.

Kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam menjaga hubungan antara lembaga dan pemangku kepentingannya. Dalam konteks organisasi publik maupun swasta, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga strategi membangun legitimasi dan akuntabilitas. Transparansi memberi kesempatan bagi publik untuk memahami proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap institusi.

Penelitian Callens dan Bouckaert (2019) dalam *Public Performance & Management Review* menunjukkan bahwa transparansi informasi berpengaruh langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik. Hasil penelitian itu membuktikan bahwa penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses mampu memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap kredibilitas lembaga. Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan hanya bentuk kepatuhan, tetapi juga investasi jangka panjang dalam membangun reputasi dan kepercayaan.

Selain itu, penerapan prinsip transparansi secara menyeluruh juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Masyarakat yang memiliki akses informasi memadai akan lebih aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan publik, yang pada akhirnya memperkuat kualitas demokrasi dan akuntabilitas lembaga. Oleh sebab itu, lembaga pemerintahan dan organisasi publik perlu menetapkan kebijakan transparansi yang tidak hanya bersifat pelaporan, tetapi juga proaktif dalam menyediakan informasi yang relevan, mudah dipahami, dan dapat diakses.

3. Tantangan Implementasi Ifrs

3.1 Regulasi Dan Perpajakan: Perbedaan Antara Standar Akuntansi Baru Dan Ketentuan Pajak Yang Berlaku.

Salah satu kendala utama dalam penerapan IFRS di Indonesia adalah ketidakharmonisan antara standar akuntansi berbasis prinsip dan peraturan perpajakan yang masih berorientasi pada aturan. IFRS menitikberatkan pada substansi ekonomi transaksi, sedangkan regulasi pajak di Indonesia lebih menekankan kepastian hukum dan aspek administratif.

Perbedaan pendekatan ini menyebabkan perusahaan harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda tujuan. Laporan berbasis PSAK-IFRS digunakan untuk kepentingan pemegang saham, investor, dan regulator pasar modal, sementara laporan fiskal disusun sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian oleh Masrukhan, Uyun, dan Mefia (2024) terhadap PT Indofood menunjukkan bahwa kondisi tersebut menimbulkan beban tambahan, terutama dalam proses rekonsiliasi, biaya administrasi yang meningkat, serta potensi salah tafsir atas transaksi. Jika perbedaan antara standar akuntansi dan ketentuan pajak tidak segera diselaraskan, risiko sengketa pajak dapat meningkat karena perbedaan interpretasi antara auditor independen dan otoritas pajak.

Untuk itu, sinkronisasi regulasi akuntansi dengan sistem perpajakan menjadi langkah penting agar penerapan IFRS berjalan efektif. Tanpa harmonisasi, konvergensi IFRS justru bisa menambah beban administrasi dan menurunkan efisiensi pelaporan keuangan perusahaan.

3.2 Sumber Daya Manusia (SDM) : Kesiapan Akuntan, Kebutuhan Pelatihan, Serta Kesenjangan Kompetensi Antara UKM Dan Perusahaan Besar.

Keberhasilan implementasi IFRS sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia, terutama akuntan. Standar ini menuntut kemampuan profesional dalam melakukan pertimbangan (*judgment*) dan pemahaman mendalam terhadap substansi ekonomi transaksi. Namun, banyak praktisi akuntansi di Indonesia masih terbiasa dengan sistem berbasis aturan yang lebih teknis, sehingga kesulitan beradaptasi dengan pendekatan prinsip yang lebih kompleks.

Kondisi tersebut semakin terasa di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang umumnya belum memiliki tenaga akuntansi profesional dan masih mengandalkan pencatatan sederhana. Penelitian oleh Gusneli, Sudarmanto, dan Erwina (2022) menemukan bahwa minimnya pengetahuan tentang IFRS membuat laporan keuangan pelaku UMKM sering tidak memenuhi kriteria transparansi dan relevansi. Maf'ul Taufiq juga menyoroti kurangnya pelatihan, keterbatasan akses terhadap literatur standar, dan lemahnya dukungan pemerintah sebagai hambatan utama peningkatan kompetensi SDM.

Akibatnya, terjadi kesenjangan implementasi antara perusahaan besar dan UMKM. Perusahaan besar dengan akses sumber daya yang lebih baik mampu menerapkan IFRS secara optimal, sedangkan UMKM tertinggal karena keterbatasan biaya dan kemampuan teknis.

Pemerintah serta lembaga profesi seperti IAI perlu memperluas program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi internasional, dan sosialisasi IFRS agar penerapannya berjalan merata di seluruh lapisan dunia usaha.

3.3 Biaya Transisi : Investasi Pada Sistem Informasi Akuntansi, Pelatihan SDM, Dan Konsultan.

Biaya implementasi menjadi salah satu tantangan signifikan dalam konvergensi IFRS. Proses adopsi tidak hanya memerlukan perubahan teknis, tetapi juga pembaruan besar-besaran pada sistem informasi akuntansi, kebijakan internal, dan struktur tata kelola.

Perusahaan besar umumnya mampu menanggung biaya tinggi untuk memperbarui perangkat lunak, melakukan pelatihan karyawan, serta menyewa konsultan eksternal agar proses transisi sesuai dengan standar IFRS. Namun, meskipun memiliki kemampuan finansial, proses ini tetap menimbulkan gangguan efisiensi karena memerlukan penyesuaian sistem yang kompleks.

Penelitian oleh Masrukhan, Uyun, dan Mefia (2024) menemukan bahwa Indofood mampu mengalokasikan dana yang cukup besar untuk proses konvergensi, tetapi sempat mengalami penurunan produktivitas internal selama masa transisi. Bagi UMKM, tantangannya lebih berat karena keterbatasan modal membuat mereka kesulitan membiayai pembaruan sistem dan pelatihan staf. Maf'ul Taufiq menegaskan bahwa sebagian besar UMKM hanya mengadopsi sebagian dari ketentuan IFRS atau menunda penerapannya sama sekali.

Ketimpangan ini menunjukkan perlunya dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif fiskal, pelatihan bersubsidi, atau bantuan teknis agar proses konvergensi IFRS dapat berjalan lebih inklusif dan efektif di seluruh sektor ekonomi.

3.4 Budaya Bisnis Lokal: Perbedaan Filosofi Akuntansi Konservatif Dengan Penerapan Nilai Wajar (*Fair Value*).

Selain kendala teknis dan biaya, faktor budaya bisnis juga berpengaruh besar terhadap efektivitas penerapan IFRS. Praktik akuntansi di Indonesia selama ini masih sangat dipengaruhi oleh prinsip konservatisme, yaitu kecenderungan menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pencatatan potensi kerugian untuk menjaga stabilitas laporan keuangan.

Namun, prinsip ini sering kali tidak sejalan dengan pendekatan nilai wajar (*fair value*) yang menjadi dasar IFRS. Penggunaan nilai wajar mencerminkan kondisi pasar terkini, tetapi dapat menimbulkan fluktuasi besar dalam laporan keuangan. Hal ini membuat sebagian pelaku usaha, terutama UMKM, ragu untuk mengadopsi IFRS secara penuh karena khawatir laporan mereka terlihat tidak stabil.

Penelitian “Konvergensi IFRS dan Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia” menunjukkan bahwa penerapan IFRS menurunkan tingkat konservatisme di perusahaan publik. Jika sebelumnya orientasi pelaporan lebih berfokus pada perlindungan kreditur, setelah IFRS fokusnya bergeser pada penyediaan informasi yang relevan dan dapat dibandingkan secara internasional.

Meski demikian, perubahan budaya tidak bisa terjadi dalam waktu singkat. Resistensi masih muncul karena kekhawatiran terhadap volatilitas nilai wajar. Oleh karena itu, implementasi IFRS di Indonesia perlu memperhatikan aspek budaya bisnis dengan mengutamakan edukasi dan sosialisasi agar pelaku usaha memahami bahwa keterbukaan informasi melalui nilai wajar justru meningkatkan kepercayaan investor dan daya saing global.

4. Pembelajaran Dari Pengalaman Internasional

4.1 Praktik Di Negara Berkembang Dengan Kondisi Serupa, Untuk Menemukan Pelajaran Yang Relevan.

Penelitian mengenai penerapan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Tiongkok, Bangladesh, Nepal, Brasil, dan Vietnam menunjukkan hasil yang bervariasi. Tujuan utama dari penelitian-penelitian tersebut adalah menilai sejauh mana adopsi IFRS memengaruhi kualitas pelaporan keuangan, transparansi, serta praktik akuntansi di masing-masing negara.

Secara umum, meskipun IFRS telah diterapkan secara formal, efektivitasnya berbeda-beda karena bergantung pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, dan tingkat profesionalisme akuntan, sementara faktor eksternal mencakup dukungan kebijakan, regulasi, serta budaya bisnis lokal.

Beberapa kendala umum yang ditemukan di negara berkembang antara lain: ketidaksesuaian antara standar nasional dan IFRS, pemahaman yang terbatas terhadap prinsip akuntansi berbasis prinsip, serta kebiasaan bisnis yang masih konservatif. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan IFRS bukan hanya sekadar mengganti format pelaporan, tetapi juga menuntut perubahan sistemik dalam mekanisme pengendalian internal, kompetensi profesional akuntan, dan sistem audit korporasi.

Keberhasilan implementasi IFRS di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah, konsistensi kebijakan, serta kesiapan lembaga pengawas. Tanpa dukungan kuat dari aspek tersebut, penerapan IFRS berisiko menjadi formalitas administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan transparansi laporan keuangan.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa kombinasi antara regulasi yang kuat, pelatihan intensif bagi profesional akuntansi, serta sistem audit yang baik merupakan kunci sukses implementasi IFRS. Berdasarkan hal ini, Indonesia dapat mengambil pelajaran penting untuk membangun strategi transisi IFRS yang lebih komprehensif agar adopsinya benar-benar meningkatkan kualitas pelaporan dan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan.

4.2 Praktik Di Negara Maju (Eropa) Dengan Tata Kelola Yang Lebih Kuat Dan Transparan.

Penerapan IFRS di negara-negara Eropa membuktikan bahwa standar internasional dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperkuat tata kelola perusahaan. Implementasi IFRS di kawasan ini menghasilkan laporan keuangan yang lebih seragam, transparan, dan mudah dibandingkan antarperusahaan maupun antarnegara, sehingga mendukung integrasi pasar modal global.

Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh konsistensi regulasi, kedisiplinan penerapan standar, serta komitmen perusahaan untuk menjaga transparansi. Negara-negara Eropa memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, mekanisme audit yang kredibel, dan profesional akuntansi dengan kompetensi tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan IFRS tidak hanya ditentukan oleh perubahan teknis dalam pelaporan, tetapi juga oleh kualitas institusi dan budaya kepatuhan yang sudah tertanam dengan baik.

Penerapan IFRS di Eropa juga berhasil mengurangi praktik manipulasi laba, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperkuat kredibilitas pasar modal. Pengalaman ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia bahwa keberhasilan implementasi IFRS harus disertai strategi transisi yang matang, termasuk penguatan kapasitas SDM, pembaruan sistem pelaporan, dan peningkatan efektivitas pengawasan internal.

Seperti yang terlihat di Eropa, standar internasional hanya dapat berjalan optimal jika didukung oleh regulasi yang tegas, budaya kepatuhan tinggi, serta tata kelola yang transparan. Oleh karena itu, Indonesia perlu menerapkan pendekatan yang serupa untuk memperkuat integritas laporan keuangan sekaligus mempercepat integrasi dengan pasar internasional.

4.3 Implikasi Bagi Indonesia Dalam Memperkuat Praktik Akuntansi Dan Pelaporan.

Perbandingan antara praktik akuntansi di negara maju dan berkembang memberikan wawasan penting bagi Indonesia dalam memperbaiki kualitas pelaporan keuangannya. Perbedaan antara Amerika Serikat dan Indonesia, misalnya, menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal sistem sertifikasi akuntan, penegakan regulasi, dan mekanisme pelaporan.

Di Amerika Serikat, penerapan standar akuntansi dijalankan dengan disiplin tinggi melalui lembaga pengawas yang kuat dan sertifikasi profesional yang memastikan kompetensi akuntan. Sementara di Indonesia, meskipun konvergensi PSAK terhadap IFRS telah dilakukan, tantangan masih muncul dalam hal penegakan hukum, kapasitas sumber daya manusia, serta perbedaan budaya bisnis.

Dari pengalaman negara maju, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi IFRS membutuhkan kejelasan regulasi, peningkatan kualitas profesional akuntansi, dan disiplin pelaporan yang konsisten. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyusun strategi peningkatan kapasitas akuntansi secara menyeluruh melalui pelatihan profesional berkelanjutan, harmonisasi kebijakan domestik dengan kondisi global, serta penguatan sistem audit dan pengawasan.

Dengan langkah tersebut, laporan keuangan perusahaan di Indonesia akan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan kredibel di mata pemangku kepentingan. Pembelajaran ini menunjukkan

bahwa upaya memperkuat praktik akuntansi di Indonesia harus tetap memperhatikan konteks lokal, tetapi berorientasi pada standar global agar mampu bersaing di tingkat internasional.

5. Efektivitas Dan Realitas Pasca Implementasi

5.1 Sejauh Mana Kualitas Tata Kelola Perusahaan Meningkat, Termasuk Isu Manajemen Laba Dan Penghindaran Pajak.

Setelah penerapan IFRS, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas standar ini sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan. Standar akuntansi internasional memang menyediakan kerangka pelaporan yang transparan, namun hasilnya baru optimal jika diimbangi dengan komitmen etika dan sistem pengawasan yang kuat.

Di Indonesia, perusahaan dengan struktur tata kelola yang baik—misalnya memiliki dewan komisaris independen dan komite audit aktif—cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal. Hal ini sejalan dengan temuan Soderstrom dan Sun (2007) yang menegaskan bahwa tata kelola berperan penting dalam menentukan sejauh mana IFRS mampu meningkatkan kualitas pelaporan.

Namun, tidak semua perusahaan menunjukkan hasil positif. Beberapa perusahaan publik masih menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan prinsip IFRS ke praktik pelaporan karena keterbatasan sumber daya manusia dan perbedaan interpretasi standar. Akibatnya, kualitas pelaporan di Indonesia belum sepenuhnya konsisten, terutama di sektor yang masih lemah dalam pengawasan internal.

Untuk meningkatkan efektivitas IFRS, perusahaan perlu memperkuat sistem pengendalian internal dan memastikan akuntan memahami substansi ekonomi setiap transaksi, bukan hanya mengikuti format pelaporan. Dengan begitu, IFRS tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

5.2 Apakah Adopsi IFRS Benar-Benar Membuat Laporan Keuangan Indonesia Lebih Selaras Dengan Standar Internasional.

Salah satu indikator keberhasilan IFRS adalah menurunnya praktik manajemen laba (*earnings management*). IFRS menekankan transparansi, pengungkapan yang luas, dan penyajian yang mencerminkan kondisi ekonomi riil. Prinsip ini diharapkan dapat membatasi ruang bagi manajemen dalam melakukan rekayasa laba untuk kepentingan tertentu.

Namun, penelitian di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Fitriani dan Sulistyawati (2021) menemukan bahwa meskipun adopsi IFRS mempersempit peluang manipulasi berbasis akrual, praktik *real earnings management* masih sering terjadi, terutama pada perusahaan dengan tekanan kinerja tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan standar akuntansi belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan perilaku manajerial.

Selain itu, perbedaan tingkat pengawasan dan struktur kepemilikan juga memengaruhi hasil penerapan IFRS. Perusahaan dengan pengawasan ketat dari investor institusional dan auditor eksternal cenderung lebih patuh terhadap IFRS, sedangkan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi pada keluarga masih memiliki kecenderungan melakukan pengelolaan laba untuk menjaga stabilitas laba jangka pendek.

Untuk itu, penerapan IFRS perlu diiringi dengan penguatan tata kelola dan peningkatan integritas pelaku bisnis agar tujuan transparansi benar-benar tercapai. Standar yang baik hanya akan efektif jika dijalankan oleh pihak yang berkomitmen terhadap etika dan akuntabilitas pelaporan.

6. Implikasi Dan Strategi Ke Depan

6.1 Bagi Regulator (OJK, IAI, BEI): Penguatan Regulasi Dan Pemantauan Implementasi.

Penerapan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), termasuk *Sustainability Disclosure Standards* (S1 dan S2), menuntut koordinasi yang kuat dan strategi implementasi yang terarah dari seluruh lembaga pengatur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar internasional, tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan transparansi serta kualitas informasi yang diberikan kepada investor. Selain itu, OJK perlu mengembangkan pedoman teknis yang lebih terperinci dan memperkuat sistem pengawasan agar potensi ketidakpatuhan atau penyimpangan pelaporan dapat diminimalkan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berperan strategis dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan sosialisasi IFRS secara berkelanjutan. Upaya ini memastikan para akuntan memahami substansi IFRS dan mampu menerapkannya dalam praktik akuntansi sehari-hari, sehingga penerapan IFRS tidak berhenti pada tataran formalitas, melainkan benar-benar meningkatkan mutu tata kelola keuangan perusahaan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga berperan penting dalam mendorong keterbukaan di pasar modal. Melalui kebijakan yang mendukung penerapan IFRS, BEI dapat memberikan insentif kepada perusahaan publik yang patuh terhadap standar pelaporan, serta menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan *best practices* antarperusahaan.

Keberhasilan konvergensi IFRS di Indonesia memerlukan sinergi antara OJK, IAI, dan BEI. Strategi utama yang perlu dikembangkan antara lain:

1. Penyelarasan regulasi nasional dengan IFRS secara konsisten.
2. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi profesional berkelanjutan.
3. Penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung pelaporan keuangan berbasis data digital terintegrasi.
4. Penguatan komunikasi dan koordinasi antar-regulator agar kebijakan berjalan searah.

Dengan strategi ini, penerapan IFRS diharapkan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga memperkuat transparansi, kredibilitas, dan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global.

6.2 Bagi Perusahaan: Strategi Transisi, Penguatan Pengendalian Internal, Dan Pelatihan SDM.

Pengendalian internal merupakan elemen krusial dalam memastikan keandalan laporan keuangan sekaligus mencegah kesalahan atau kecurangan (*fraud*), khususnya dalam pengelolaan kas. Sistem yang efektif harus memuat beberapa unsur penting berikut:

1. Pemisahan tugas, agar tidak ada individu yang memiliki kendali penuh atas seluruh proses transaksi kas.
2. Otorisasi transaksi, untuk menjamin bahwa setiap transaksi telah disetujui sesuai prosedur dan kebijakan perusahaan.
3. Rekonsiliasi rutin, yaitu pemeriksaan berkala antara catatan kas dan bukti transaksi guna mendeteksi kesalahan sedini mungkin.
4. Dokumentasi lengkap, agar setiap transaksi dapat diverifikasi secara transparan dan akurat.

Sistem pengendalian internal tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dengan sistem yang kuat, perusahaan dapat meningkatkan akurasi pelaporan, mengurangi risiko kesalahan, serta memperkuat kepatuhan terhadap standar IFRS.

Peran manajemen puncak sangat menentukan keberhasilan penerapan sistem ini. Keterlibatan direksi dan dewan komisaris dalam pengawasan memastikan adanya konsistensi, dukungan sumber daya, serta budaya integritas di seluruh organisasi. Dengan demikian, pengendalian internal bukan sekadar alat kontrol, melainkan fondasi strategis untuk membangun perusahaan yang akuntabel, transparan, dan berdaya saing global.

6.3 Bagi Akademisi Dan Mahasiswa: Pentingnya Pendidikan Akuntansi Yang Relevan Dengan IFRS.

Akademisi dan mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan penerapan IFRS di Indonesia. Mahasiswa akuntansi perlu memahami secara mendalam prinsip-prinsip IFRS agar siap menghadapi tantangan profesi di era globalisasi. Tingkat pemahaman ini menjadi tolok ukur kesiapan generasi baru akuntan dalam menerapkan standar pelaporan keuangan internasional.

Akademisi memegang tanggung jawab dalam memperbarui kurikulum pendidikan akuntansi agar relevan dengan perkembangan IFRS. Kurikulum ideal tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga menekankan praktik melalui studi kasus, simulasi pelaporan, serta integrasi nilai etika dan tata kelola. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami konsep IFRS, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi bisnis nyata.

Kompetensi dosen juga menjadi kunci keberhasilan. Dosen perlu menggunakan metode pembelajaran aktif berbasis kasus dan teknologi, agar mahasiswa mampu memahami penerapan

IFRS secara kontekstual. Bagi mahasiswa, penguasaan IFRS tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik, tetapi juga memperluas peluang karier di dunia profesional.

Lulusan yang memahami IFRS memiliki kemampuan analisis dan penyusunan laporan keuangan berstandar internasional, yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Oleh karena itu, pendidikan akuntansi berbasis IFRS merupakan fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia profesional yang mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola perusahaan di Indonesia.

SIMPULAN

Konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) merupakan langkah strategis yang menandai transformasi besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk menyelaraskan standar akuntansi nasional dengan praktik global yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan relevansi informasi. Melalui penerapan IFRS, laporan keuangan di Indonesia diharapkan menjadi lebih dapat dibandingkan, lebih informatif, dan lebih mampu mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Dengan demikian, konvergensi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor domestik dan asing, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan internasional.

Secara empiris, penerapan IFRS terbukti memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. Relevansi nilai informasi meningkat, tingkat transparansi membaik, serta praktik manajemen laba cenderung menurun di sektor-sektor dengan tata kelola yang kuat. Namun, efektivitas penerapan IFRS belum merata di seluruh sektor perekonomian. Perusahaan besar dengan dukungan modal dan teknologi lebih siap mengimplementasikannya, sedangkan usaha kecil dan menengah masih terkendala oleh biaya transisi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman terhadap prinsip berbasis nilai wajar.

Tantangan lainnya terletak pada ketidaksesuaian antara standar akuntansi dan sistem perpajakan nasional yang masih berbasis aturan. Hal ini menimbulkan beban administratif tambahan karena perusahaan harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda tujuan. Selain itu, aspek budaya bisnis yang masih konservatif membuat sebagian pelaku usaha enggan beralih ke konsep nilai wajar yang dianggap berisiko terhadap stabilitas laba.

Oleh karena itu, keberhasilan penerapan IFRS membutuhkan kolaborasi aktif dari berbagai pihak. Regulator seperti OJK, IAI, dan BEI perlu memperkuat harmonisasi kebijakan serta mendorong pengawasan yang konsisten. Dunia usaha harus membangun sistem pengendalian internal yang lebih kuat dan berinvestasi dalam pelatihan SDM. Di sisi lain, lembaga pendidikan dan profesi akuntansi wajib memperbarui kurikulum serta memperkuat pelatihan IFRS agar akuntan muda mampu bersaing di tingkat global.

Secara keseluruhan, konvergensi PSAK berbasis IFRS bukan sekadar perubahan teknis dalam pelaporan keuangan, tetapi merupakan fondasi menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Jika seluruh pemangku kepentingan dapat menjaga konsistensi dan komitmen terhadap prinsip IFRS, maka Indonesia akan mampu menciptakan sistem pelaporan keuangan yang tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional di era globalisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Aryanto Nur S.E, M.M, M.Ak, Ak, CPA selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah I, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan akademik selama proses penyusunan jurnal ilmiah ini. Arahan yang beliau berikan tidak hanya terbatas pada aspek teknis penulisan, namun juga memperkaya wawasan penulis dalam memahami implementasi PSAK berbasis IFRS di Indonesia, baik dari sisi dampak, tantangan, maupun relevansinya dalam konteks global.

Selain itu, penulis juga menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para peneliti dan akademisi yang karyanya dijadikan rujukan dalam artikel ini. Setiap jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang telah dihasilkan oleh mereka bukan hanya menjadi pijakan ilmiah, tetapi juga menjadi pencerahan bagi penulis dalam mengembangkan argumen serta menyusun kerangka pemikiran. Tanpa kontribusi penelitian sebelumnya, artikel ini tidak akan tersusun dengan baik dan tidak akan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai implementasi PSAK berbasis IFRS di Indonesia.

Akhir kata, penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa artikel ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang membangun dari para pembaca maupun pihak lain yang peduli terhadap pengembangan ilmu akuntansi. Harapan penulis, karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, walaupun kecil, bagi pengembangan literatur akuntansi, khususnya terkait harmonisasi standar akuntansi internasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Callens, M. 2019. *Trustworthiness and Information Disclosure among Judicial Governmental Agencies*. *Journal of Trust Research*. <https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1572019> (Diakses tanggal 21 September 2025).
- [2] Cualain, G. O., Wijayanti, I., & Sayidatul Muntiah, N. 2022. Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode *Full Costing, Variable Costing, Dan Activity Based Costing* Sebagai Dasar Penentuan Harga Jual. *Cogent Business & Management*. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2148869> (Diakses tanggal 21 September 2025)
- [3] Dwi Martani, S. V. S., Wardhani, R., Farahmita, A., Tanujaya, E., & Hidayat, T. 2019. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK: Buku 2 (PSAK Konvergensi IFRS)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] Efrithania, R. 2023. Tingkat Pengetahuan Mahasiswa S1 Akuntansi Terhadap Perubahan PSAK. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/7080/3573> . (Diakses tanggal 25 September 2025)
- [5] Farichah, F. 2017. *Relationship of Earnings Management and Earnings Quality Before and After IFRS Implementation In Indonesia*. <https://eu.docworkspace.com/d/sIJWjMiMaT651MYG> (Diakses tanggal 21 September 2025).
- [6] Farida, L. E. 2012. *Transformasi Akuntansi Indonesia Melalui Konvergensi IFRS*. Jurnal INTEKNA, Politeknik Negeri.
- [7] Fong, A. 2016. Dampak Penerapan IFRS di Negara Berkembang – Perbandingan Lintas Negara. *Jurnal Akuntansi Manajerial (JAM)*. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM/article/view/735>(Diakses tanggal 28 September 2025). DOI: <https://doi.org/10.52447/jam.v1i1.735>
- [8] Herdiansen., Puspita, M. E., 2024. Dampak Implementasi Standar Akuntansi terhadap Laporan Keuangan Perusahaan. <https://www.ulilalbabainstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/3918> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- [9] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (n.d.). *Sejarah Perkembangan SAK dan Konvergensi IFRS di Indonesia*. Diakses dari situs resmi IAI.
- [10] IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). 2024. Era Baru Pengungkapan Keberlanjutan: Sinergi OJK dan IAI dalam Adopsi IFRS. https://web.iaiglobal.or.id/BeritaIAI/detail/era_baru_pengungkapan_keberlanjutan_sinergi_ojk_dan_iai_dalam_adopsi_ifrs_s1_s2 (Diakses tanggal 21 September 2025)
- [11] Lestari, M. 2024. Perkembangan IFRS di Dunia dan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jakpg/article/view/504> (Diakses tanggal 21 September 2025)
- [12] Maiyami, R., Herawaty, N., Fitriyani, D. 2024. Pengaruh Penerapan *International Financial Reporting Standards (IFRS)* Terhadap Nilai Perusahaan. <https://eu.docworkspace.com/d/sIBOjMiMaRKh1MYG> (Diakses tanggal 21 September 2025).
- [13] Petreski, M. 2006. *The Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) Adoption on the Quality of Financial Reporting*. *Journal of Accounting and Finance Research*.
- [14] Purba, G.K., Halim, I. 2023. Tantangan Implementasi IFRS dalam Mengidentifikasi Pihak Pengendali. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/download/15550/pdf> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- [15] Sari, S. Analisis Penerapan *International Financial Reporting Standard (IFRS)* pada Laporan Keuangan PT. Garuda Indonesia cabang Banda Aceh. <https://eu.docworkspace.com/d/sIGWjMiMaT2v1MYG> (Diakses tanggal 21 September 2025).
- [16] Setiaji, F., Wijayanto, K. 2019. *Effect of Foreign Investment Flow, World Capital Market, Foreign Exchange, Encountry Risk to the Capital Market Return In Indonesia*. <https://journal.unnes.ac.id/sju/maj/article/view/24137> (Diakses tanggal 21 September 2025).
- [17] Sukmawati, S., Fujiningsih. S. 2021. *IFRS Adoption Research in Indonesia: A Systematic Literature Review*. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13280/pdf> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- [18] Weygandt, J. J., Kieso, D. E., & Kimmel, P. D. 2018. *Financial Accounting: IFRS Edition* (4th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- [19] Yulan, P., Putra, I. S. Strategi Penguatan Sistem Pengendalian Internal Untuk Menghindari Terjadinya Fraud Pada Kas Perusahaan. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/488> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- [20] Yusuf, M.F.M., Gurusu, I.A., Rauf, D.M. 2025. Konfergensi IFRS di Indonesia: Analisis Dampak Terhadap Manajemen Laba dan Transparansi Laporan Keuangan. <https://eu.docworkspace.com/d/sIC6jMiMApFZ08Yg> (Diakses tanggal 28 September 2025).